



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR - TAHUN 2020
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA UTARA

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)J-t,

Don an Persetujunn Borsnrna
DEWAN PER.WAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MINAHASA UTARA

d/\n

BUPATI MINAHASA UTARA

MEMUTUSKAN :

Mcnotnpknn

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN
2019

Pasal 1

Pirtanggungjawaban pelaksanaan APBD bcrupa laporan
keunngan mernuat :

- n. Lapornn Rcalisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Perubnhan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
- c. N raca;
- d. Laporan Oprasional (LO);
- e. Laporan Arus Kos (LAK);
- f. Laporan Pcrubahan Ekuitos (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagairnana dirnaksud dalam
Pasal 1 huruf a untuk tahun yang berakhir sarnpai dengan
31 Dcsernber 2019 sebagai berikut :

n, Pendapatan	Rp.	1.039.893.227.379, 13
b. Belanja	Rp.	1.064.497.375.384,00
Surplus/ (lrefisit]	Rp.	124.604. 148.004,87)
r. Pembiayann		
- Penerimaan	Rp.	72.893.885.829,40
· Pengeluaran	Rp.	0,00
Pembiayann Netto	Rp.	72.893.885.829,40
Sisa Lebih Pembiayaan Anggarann ISILPA)	Rp.	48.289.737 .824,53

Pasal3

Urainn laporan realisasi anggaran sebagaimnna dirnaksud
dalrnn Pasal 2 sebagai bcrikut :

- n. S lish nnggarann dengan realisasi p ndapatan sejumlah
Rp. (2.693.817561,87) deugan rincian sebagai berikut:
 - 1) Anggaran pendapatan setelah
perubahnn Rp. 1,042,587,074,911.00
 - 2) Reulisasi pendapatan setelah
perubnhan Rp. 1,039,893,227,379.13Selisih lclJih/(kurang) Rp. (2,693,8 17,561.87)
- h. Selisih anggurann dengan realisasi b lanja sejumlah ~p.
(~0.983.585.386,40) rlcngan rincinn s bagni bcrikut :J~

1) Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.	1,115,480,960,770.40
2) Realisasi belanja setelah perubahan	Rp.	1,064,497,375,384.00
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(50,983,585,386.40)
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp.48.289.737.824,53 dengan rincian sebagai berikut:		
1) Anggaran surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp.	(72,893,885,829.40)
2) Realisasi surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp.	(24,604,148,004.87)
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	48,289,737,824.53
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0.00 dengan rincian sebagai berikut:		
1) Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	72,893,885,829.40
2) Realisasi penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	72,893,885,829.40
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	0.00
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:		
1) Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0.00
2) Realisasi pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0.00
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	0.00
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.0.00 dengan rincian sebagai berikut :		
1) Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	72,893,885,829.40
2) Realisasi pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	72,893,885,829.40
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	0.00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	72,893,885,829.40
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan	Rp.	72,893,885,829.40
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPAJ)	Rp.	48,289,737,824.53
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	48,289,737,824.53

Pasal 5

Neraca sebagai berikut dimaksud pada pasal 1 huruf c per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Hp.	1,620,580,000,149,18
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	1,289,068,300,5
c. Jumlah Ekuitas	Rp.	(>092,8J, I. o. 7J

Pasal 6

Laporan Perbandingan (LO) sebagai berikut dimaksud pada pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut.:

a. Jumlah Perbandingan-LO	Hp.	930,570,092.201.07
b. Jumlah Beban-LO	Rp.	8f>3,1'11,52 t, IO > 70
c. Surplus/ Defisit dari Operasi	Hp.	76,4 7,571,094.37
d. Surplus/Defisit dari Pos Lain-lain Biasa	Hp.	75,7(06,693,327 .83
e. Surplus/Defisit dari Pos Lain-lain Biasa	Rp.	(191,2..6,056.00)
f. Surplus/Defisit - LO	Rp.	75,575,167,27 1.83

Pasal 7

Laporan Arus Kas (LAK) sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

Saldo awal kas di BUD dan Bendahara	Rp.	72.419.593.747,40
Pengeluaran dan Penerimaan per 31 Desember 2019		
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp.	189.501.531.421, 13
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp.	(214 .105.679.426,00)
Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp.	475042103,00
Saldo akhir kas di BUD, Kas di Bendahara	Rp.	44.731.940.243,53
Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan		
Saldo akhir kas di Bendahara FKTP	Rp.	249.63.948,00
Saldo akhir di Bendahara Dana BOS	Rp.	3.309.383.654 ,00
Saldo akhir Kas	Rp.	48.290.487.845,53

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.	1.515.830.943.438, <0
b. Surplus/ Defisit-LO	Rp.	75.575.467.27 1,83
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mend. ar :		
1) Sell off Realisasi Aset Tetap	Rp.	0,00
2) Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp.	17.888.422.429 ,00
d. Ekuitas Akhir	Rp.	1.609.211.331.39,73

Pasal 9

Manajemen Laporan Keuangan sebagai berikut dimaksud pada pasal 1 huruf g per 31 Desember 2019 mengenai informasi keuangan secara kuantitatif maupun kualitatif atas posisi keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal tercantum dalam lampiran Rancangan Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tercliri atas :
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; dan
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
- c. Lampiran III : Laporan Operasional (LO);
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas (LAI);
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIU : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati. J~

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Utara),

Ditetapkan di Airmadidi
Pada tanggal 20 Mei 2020

MINAHASA UTARA


VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN

Diundangkan di : Airmadidi
Pada Tanggal : 20 Mei 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA,**



JEMMY HENGGY KUBU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA: (1 h.o.)